
Assets, Liabilities, And Owners' Equity A Critical Review

Nurhayati Siregar¹, Wahyu Purbo Santoso², Sarah Sumiati³, Abdul Aziz^{4*}

Universitas Siber Asia Jakarta¹², IAIN Syekh Nurjati Cirebon³⁴,
Email: nurhayatisiregar@lecturer.unsia.ac.id, purbosantoso@lecturer.unsia.ac.id,
sarahsumiati46@gmail.com, abdulaziz@syekhnurjati.ac.id

Received: 2023-06-24; Accepted: 2023-08-24; Published: 2023-08-30

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tiga factor utama dalam konsep dasar akuntansi yang berhubungan pelaporan neraca suatu perusahaan, seperti asset, liabilitas, dan kepemilikan modal. Dimana asset merupakan sesuatu yang dimiliki saat ini dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat baik sekarang maupun di masa mendatang. Sedang, kewajiban merupakan suatu utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Sementara, kepemilikan orang (proprietorship) atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa dalam pelaporan akuntansi harus mencantumkan laporan asset, kewajiban dan owener's equity sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen akuntansi sehingga bentuk apa pun organisasinya, paling tidak harus memenuhi tiga prinsip tersebut.

Kata Kunci : Aset, liabilitas, equity, akuntansi, manajemen, pengendalian

Abstract

The purpose of this research is to describe the three main factors in the basic concepts of accounting related to the reporting of a company's balance sheet, such as assets, liabilities, and capital ownership. Where an asset is something that is currently owned and has the ability to provide benefits both now and in the future. Meanwhile, a liability is a debt of the entity arising from past events, where its settlement causes an outflow of economic resources of the entity. Meanwhile, proprietorship ownership of the company is the sum of the company's assets minus the company's debt to creditors. The method used is descriptive analysis by reviewing various literatures relevant to the topic. The findings of this paper are that accounting reporting must include asset, liability and owner's equity reports as a form of accounting management accountability so that whatever form the organisation takes, it must at least meet these three principles..

Keywords: Assets, liabilities, equity, accounting, management, control

Copyright © 2023 Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Akuntansi yang dipraktikkan dalam suatu wilayah negara merupakan suatu hasil rancangan dan pengembangan untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Praktik akuntansi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti faktor sosial, ekonomi, politis, dan sebagainya (Kristiana, 2019). Hal ini menyebabkan praktik akuntansi dalam suatu wilayah negara tertentu bisa tidak sama dengan praktik akuntansi di negara lainnya. Untuk melaksanakan suatu praktik akuntansi yang baik, tidak cukup hanya mempelajari akuntansi secara praktik saja (Elisabet, 2019). Karena dibalik praktik akuntansi terdapat berbagai gagasan, asumsi dasar, konsep, penjelasan, dan sebagainya, yang semuanya terangkum dalam teori akuntansi. Teori akuntansi sendiri merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan mengapa praktik akuntansi berjalan seperti yang ada sekarang (Sitorus, 2022).

Praktik akuntansi umumnya menemui beragam permasalahan yang harus dipecahkan. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengalaman semata, namun untuk mencapai praktik akuntansi yang baik dan sehat, maka dalam menyelesaikan masalah juga diperlukan landasan teori yang sehat dan baik pula (Kawatu, 2019). Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik akuntansi. Pengetahuan terhadap teori akuntansi akan mengimbangi berbagai keterbatasan pengalaman dan kemampuan praktis dalam menyelesaikan masalah (Wibowo, 2020). Dengan teori akuntansi orang akan dapat melihat suatu permasalahan dengan perspektif yang lebih luas dan terinci, dan tanpa teori yang melandasinya, praktik akuntansi yang baik dan sehat bisa dipastikan tidak akan tercapai. Salah satu permasalahan akuntansi sering ditemui pada laporan keuangan (Putri, 2022).

Aset merupakan salah satu dari bagian neraca yang dapat membentuk informasi berupa posisi keuangan jika dikaitkan dengan bagian neraca lainnya. Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberi manfaat usaha di masa mendatang (Parmono & Zahriyah, 2021). Aset dipahami sebagai harta total. Aset dapat menggambarkan potensi badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Sama halnya dengan kewajiban dan modal dimana 2 hal ini tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan Terdapat perubahan-perubahan teori asset, kewajiban, dan modal pada kerangka pelaporan keuangan era IFRS dengan PSAK yang sebelumnya yang mengacu pada US GAAP (Nur, 2020). Untuk mengetahui lebih banyak teori mengenai aset, kewajiban dan modal maka ditulislah penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Definisi Aset

Nur (2020) mengartikan aset merupakan sesuatu yang dimiliki saat ini & memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat baik sekarang maupun di masa mendatang. Menurut Harmain et al. (2019) istilah tersebut merujuk kepada property, hak atas property, sumber daya ekonomi, penyimpanan jasa masa depan dan dapat berwujud seperti gedung, ataupun tidak berwujud seperti goodwill. Menurut Paton & Littleton (2002) bahwa aset merupakan sejumlah potensi jasa yang dapat dipertukarkan yang memberikan potensi jasa yang lain bagi perusahaan.

IASB (AASB) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan aset sebagai sumberdaya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang mengalir pada badan. Terdapat karakteristik penting dalam membahas definisi aset yaitu:

- a. Manfaat ekonomi masa depan
- b. Kontrol oleh entitas
- c. Peristiwa masa lalu

Dewasa ini muncul perdebatan mengenai dimasukkannya '*exchangeability*' atau aset dipertukarkan sebagai komponen ke empat dari karakteristik di atas. Dan, akhirnya menambah kebutuhan untuk aturan pengakuan aset atau '*assets recognition*' ketika mengidentifikasi aset.

1. *Manfaat Ekonomi Masa Depan*

Kerangka definisi IASB menentukan esensi aset sebagai manfaat ekonomi masa depan. Menurut Putri (2022) bahwa manfaat untuk entitas bisnis nirlaba dikaitkan dengan kegiatan yang menghasilkan laba yang diwujudkan dalam aset adalah potensi untuk berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas ke entitas. Kerangka IASB mendefinisikan titik-titik esensi dari aset sebagai manfaat ekonomi yang akan datang yaitu:

- a. Manfaat bagi badan usaha nirlaba bahwa aktivitas yang menghasilkan keuntungan.
- b. Aset mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan arus kas atau setara kas pada badan usaha dapat melalui kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan dari entitas atau dari kemampuan mengurangi pengeluaran kas seperti mengurangi biaya produksi. Definisi aset dalam hal ini adalah bagaimana cara mencari keuntungan sehingga aset harus memiliki manfaat ekonomu dalam membantu entitas mencapai tujuannya salah satunya yaitu mengurangi kas keluar.
- c. Gagasan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Godfrey dan kawan-kawan mengatakan ada dua karakteristik utama dari sumber daya ekonomi yaitu kelangkaan dan utilitas. Jika sumberdaya tidak langka maka sumber daya tidak dikatakan ekonomi. Sedangkan utilitas adalah kemampuan untuk memuaskan kebutuhan manusia.
- d. Sprague melihat aset sebagai penyimpanan manfaat yang akan diterima. Selain itu Vetter mendefinisikan aset sebagai perwujudan kepuasan masa depan dalam bentuk potensi layanan yang dapat diubah, diukur atau disimpan terhadap peristiwa masa depan sehingga aset dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang ada sekarang dan memiliki kemampuan memberikan jasa atau manfaat saat ini atau dimasa depan.

2. *Dikendalikan Oleh Badan Usaha*

Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagai aset. Ijiri (1977) menyatakan akuntansi tidak peduli dengan sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya mereka yang berada dibawah kendali dari entitas yang diberikan. Sprague (1980) berkomentar bahwa kepemilikan sesuatu hanyalah hak untuk menggunakan atau mengontrol aset terbaru. Kontrol pemilik memiliki poperti itu tidak mutlak seperti yang dikatakan oleh Hasenfeld & Paton (1980) menunjukkan bahwa ruang lingkup kepentingan pribadi selalu tunduk pada hak-hak umum negara. Contoh, pemerintah dapat melarang kepemilikan pembuatan produk tertentu melalui kekuatannya, hal tersebut dapat membatalkan kontrol seseorang atas poperti hal ini juga dapat menyita poperti untuk pajak dan permintaan bahwa produk dan aset sesuai dengan standar tertentu atau bahwa mereka digunakan untuk tujuan tertentu saja.

Kepemilikan biasanya sesuai dengan pengendalian, tetapi ini bukan merupakan karakteristik aset yang penting. Sebagai contoh, kata Kurniawati (2011) adanya agen yang mempunyai kewajiban menjual barang milik prinsipal, barang tersebut bukan aset dari agen

tetapi aset principal tetapi karena agen yang mengendalikan maka itu adalah kepemilikan agen. Konsep hukum yang digunakan dalam akuntansi, menurut Putra (2021) sebagai pedoman saja, tujuan akuntansi tidak dicapai dengan berfokus pada ketetapan konsep hukum melainkan dengan berkonsentrasi pada substansi ekonomi dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kondisi. Jadi melihat benda-benda ekonomi tertentu yang disebut "aset" muncul, faktor utamanya adalah pengendalian. IASB memberikan definisi tidak hanya mengendalikannya "keberlakuan hukum" tetapi juga sanksi ekonomi dan sosial.

3. *Peristiwa Masa Lalu*

Sri Wahyuni et al. (2020) menjelaskan bahwa kualifikasi bahwa aset harus dikendalikan oleh entitas pelaporan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dalam definisi Kerangka kerja aset memastikan bahwa aset 'direncanakan' dikecualikan. Misalnya, mesin yang sudah diperoleh oleh perusahaan adalah aset, tetapi mesin yang akan diperoleh sesuai dengan anggaran bukan merupakan aset sampai diperoleh karena acara transaksi pembelian belum terjadi.

Istilah 'peristiwa' dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Apakah penandatanganan kontrak merupakan peristiwa? Jika sebuah perusahaan menandatangani kontrak dengan perusahaan konstruksi untuk memiliki gedung kantor baru yang didirikan di masa depan dengan harga tertentu, apakah ini memenuhi syarat sebagai 'peristiwa' sehingga aset harus dicatat? Jenis kontrak ini biasa disebut 'kontrak eksekutori sepenuhnya'. Kontrak-kontrak eksekutif sepenuhnya muncul di mana setiap pihak dalam kontrak belum melakukan persentase yang persis sama dari kewajibannya berdasarkan kontrak (Sri Wahyuni et al., 2020).

Setter standar, seperti AASB, di masa lalu telah mengeksplorasi implikasi dari kontrak eksekusi. Dalam kerangka kerja konseptual pra-2005 Australia (Pernyataan Konsep Akuntansi 4) dewan menganggap bahwa kontrak seperti sewa, kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan dan kontrak valuta berjangka menimbulkan aset dan kewajiban yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam keuangan pernyataan. Preparers (dalam Lai et al., 2018) menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pelaporan kontrak pelaksana pada neraca meningkatkan leverage (baik aset dan kewajiban akan diakui tetapi nilai kewajiban akan lebih besar) meskipun tidak ada perubahan nyata dalam utang ekonomi pelaksana yang mendasari perusahaan.

Pada 1970-an FASB menugaskan Ijiri untuk melakukan proyek penelitian tentang kontrak-kontrak eksekutif. Ijiri (1977) beralasan bahwa kontrak-kontrak eksekutif sepenuhnya 'tampaknya memenuhi ujian pertama untuk pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan'. Dalam contoh konstruksi di atas, kedua pihak memiliki 'hak atas kinerja masa depan' yang ada saat ini dan ini bukan hak masa depan yang akan dibuat di masa depan. Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontraktual memenuhi definisi aset (tes pertama), maka harus memenuhi 'kriteria pengakuan' tertentu sebelum dicatat. Salah satu kriterianya adalah kegunaan lainnya adalah 'keteguhan' kontrak.

Saat ini beberapa kontrak eksekusi diakui sebagai aset sementara yang lain tidak, tergantung pada persyaratan standar akuntansi. Misalnya, berdasarkan IAS 17/AASB 117 sewa pembiayaan menimbulkan aset dan kewajiban, sementara sewa operasi tidak. Perbedaan antara keuangan dan sewa operasi tidak didasarkan pada prinsip teoritis tetapi apakah sewa mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset (IAS 17, pasal 4). Preparers (dan auditor dan regulator pada gilirannya) harus memutuskan apa yang merupakan 'secara substansial semua risiko dan penghargaan'.

Kerangka kerja LASB memberikan definisi aset dan kewajiban (lihat bab 8) yang, Yang diambil bersama-sama, menunjukkan bahwa sewa harus dikapitalisasi. Kelompok penetapan

standar G4 + 1 berpendapat bahwa lessee harus mengakui, pada awal sewa, nilai wajar hak dan kewajiban yang disampaikan oleh sewa. Pendekatan ini konsisten dengan kerangka kerja konseptual IASB dan FASB, sementara praktik saat ini di bawah IAS 17 / AASB 117 dan US GAAP (FAS 13) tidak. Isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi untuk sewa dieksplorasi lebih lanjut di bagian berikutnya bab ini dan di bab 3 dan 4.

4. *Bisa Dipertukarkan*

Beberapa peneliti berpendapat bahwa definisi aset harus memasukkan kondisi bahwa aset dapat ditukarkan. Kemampuan tukar berarti bahwa suatu barang dapat dipisahkan dari suatu entitas, dan bahwa nilai yang dibuangnya adalah terpisah dari nilai entitas. Pada tahun 1933, MacNeal (1983) menyatakan barang bagus yang tidak dapat dipertukarkan harus tidak memiliki nilai ekonomi karena pembelian atau penjualannya harus selamanya. Dengan demikian tidak ada harga pasar untuk barang tersebut.

Aset yang paling dipengaruhi oleh kondisi ini adalah *goodwill*, karena tidak dapat dijual secara terpisah dari aset lain. Chambers (2002) memberikan alasan-alasan berikut untuk memaksakan keterpisahan dan untuk mengedepankan *goodwill* sebagai aset. Definisi muncul dari kebutuhan mengingat kapasitas suatu entitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan keadaan dan lingkungannya. Perilaku adaptif menyiratkan bahwa itikad baik yang ada dalam koleksi aset dan kewajiban apa pun rentan terhadap variasi untuk tidak memiliki kualitas yang abadi. Chambers (2002) juga berpendapat bahwa menentukan posisi keuangan melibatkan pengukuran nilai aset dan kewajiban, tetapi *goodwill* tunduk pada 'evaluasi', bukan pengukuran. Nilainya hanya dapat dihitung secara antisipatif. Dalam membuat perhitungan, kinerja masa lalu dari suatu perusahaan dapat digunakan sebagai dasar, tetapi seluruh perhitungan dan norma-norma yang digunakan untuk perbandingan bersifat hipotesis, dan tidak tunduk pada pembuktian independen. Nilai yang dipastikan untuk *goodwill* tidak sama dengan nilai aset dan liabilitas lainnya. Menurut pendapat Chambers (2002), ini sama saja dengan menambahkan apel dan jeruk.

Mereka yang menentang kondisi tukar menukar berpendapat bahwa pencapaian hanya satu cara untuk mendapatkan manfaat aset. Misalnya, persediaan adalah salah satu jenis aset yang manfaatnya diperoleh terutama melalui perangkat. Namun manfaat dari sebagian besar aset seperti pabrik dan mesin dan gedung perkantoran diperoleh melalui penggunaannya. Manfaat dari aset ini tidak terpengaruh oleh apakah mereka dapat ditukarkan. Kritik juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi bergantung pada kelangkaan dan utilitas, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Seperti dinyatakan Moonitz (1942), pertukaran tidak menghasilkan nilai, itu hanya mengungkapkannya. Akhirnya, lawan berpendapat bahwa masuknya berwujud seperti *goodwill* sebagai aset bukanlah upaya untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi hanya upaya untuk mengidentifikasi dan menghargai sumber-sumber tertentu dari manfaat masa depan bagi perusahaan.

Menurut Fitri dan Ismail (2023) bahwa *Exchangeability* merupakan suatu karakteristik yang mendukung keberadaan suatu aset. Namun, itu bukan karakteristik penting. Apakah benar-benar penting apakah pertukaran adalah kriteria? Bukti menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini adalah ya. Bagian dari alasan bahwa, bahkan jika *goodwill* dikecualikan dari perhitungan *leverage* untuk tujuan perjanjian utang, dan bahkan jika kerusakan *goodwill* periode-saat ini dikecualikan dari langkah-langkah pengembalian ekuitas, jumlah ekuitas dalam *rasio leverage* dan dalam beberapa rasio pengembalian dipengaruhi oleh penurunan nilai *goodwill* periode sebelumnya, dan ini dapat mempengaruhi apakah suatu perusahaan melanggar perjanjian utang. Juga, ada beberapa bukti bahwa investor mempersepsikan nilai dalam jumlah *goodwill* yang dilaporkan pada neraca, dan bahwa para manajer menandakan nilai tidak dapat dikenali (*goodwill*) yang tidak teridentifikasi melalui kebijakan akuntansi *goodwill* mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif karena lebih banyak mengkaji teori dan konsep secara kritis dalam kajian terhadap jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan, baik yang diterbitkan secara nasional maupun internasional serta buku-buku referensi. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dengan mengumpulkan tulisan-tulisan terkait dari jurnal yang terindeks dan tidak terindeks. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) karena penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yang lebih menekankan pada interpretasi isi melalui display data, reduksi data, interpretasi data sehingga memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Aset

Pada umumnya, kata Romita et al. (2015) bahwa pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem pembukuan akuntansi sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. FASB (1984) dalam Statement Of Financial Accounting Concepts No. 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada empat kriteria sebagai berikut:

- **Definisi (*Definition*)**
Definisi merupakan suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memiliki definisi elemen laporan keuangan;
- **Keterukuran (*Measureability*)**
Keterukuran ialah suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reabilitas yang tinggi;
- **Relevansi (*Relevance*)**
Relevansi ialah informasi yang terdapat (terkandung) dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan;
- **Reliabilitas (*Reliability*)**
Reliabilitas adalah suatu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya (*verifiable*) dan netral.

Pengenalan aset pada neraca, kata Abdullah (2003) melibatkan kondisi yang dapat disebut aturan pengakuan. Aturan-aturan ini telah dirumuskan karena akuntan membutuhkan bukti untuk mendukung catatan mereka dalam lingkungan ketidakpastian, Akuntan ingin memastikan bahwa aset tertentu ada dan bahwa penyertaan aset dalam neraca menyediakan informasi yang berguna, relevan, dan dapat diandalkan.

Beberapa aturan pengakuan secara informal dinyatakan sebagai konvensi, dan yang lainnya secara resmi ditetapkan dalam pernyataan resmi. Dua contoh aturan pengakuan konvensional adalah:

- Akun piutang dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit dilakukan.
- Peralatan dicatat sebagai aset saat dibeli.

Contoh pedoman pengakuan yang secara resmi ditentukan adalah pedoman yang diadopsi untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Untuk penyewa, sebagaimana diatur dalam paragraf 10 dari IAS 17 / AASB 117, memenuhi salah satu kriteria berikut. Penerapan definisi dalam dunia nyata melibatkan sejumlah kondisi yang dinamakan aturan pengakuan (*recognized rules*). Aturan tersebut diciptakan sesuai keinginan akuntan untuk memperoleh bukti dalam kondisi ketidakpastian. Beberapa aturan secara informal diwujudkan

dalam bentuk konversi atau hal lain yang secara formal di rancang oleh badan yang berwenang. Contoh aturan menurut konversi adalah piutang dagang dicatat bila penjualan kredit dilakukan dan peralatan dicatat saat pembelian. Kemudian contoh aturan yang didasarkan pada keputusan badan berwenang adalah Capital Lease. Dalam SFAS No. 13 "Accounting for Lease" disebutkan bahwa kapitalisasi lease (sewa guna usaha) hanya dilakukan bila salah satu atau lebih kriteria berikut dipenuhi:

- * Adanya transfer hak milik kepada pembeli (lessee)
- * Kontrak menyebutkan adanya hak boleh pilih (option) untuk membeli dengan syarat yang menguntungkan pembeli.
- * Jangka waktu leasing 75% atau lebih dari sisa taksiran umur ekonomi pada saat kontrak ditandatangani.
- * Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% dari nilai pasar yang wajar dari aktiva yang disewa terhitung sejak kontrak dimulai.

Praktik menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria. Oleh karena itu perlu dibuat perbedaan antara aturan/ketentuan pengakuan (*recognition rules*) dengan kriteria pengakuan (*recognition criteria*). Aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Sedangkan kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Ada beberapa kriteria yang diajukan sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada hukum
Pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Kriteria ini berkaitan dengan relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Contohnya adalah piutang merupakan konsep hokum yang memberikan kita hak menerima pembayaran karena penjualan yang telah dilakukan.
- b. Pemakaian Prinsip Konservatif
Prinsip konservatif mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian dari pada keuntungan. Konservatif adalah tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan pertimbangan yang diperlukan dalam membuat perkiraan pada kondisi ketidakpastian, seperti aset atau pendapatan tidak dibesar-besarkan dan kewajiban atau pengeluaran tidak diremehkan. Konservatisme menyiratkan bahwa kewajiban dapat dicatat lebih awal, tetapi bukan aset.
- c. Makna/Substansi Ekonomi Suatu Transaksi
Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka suatu pos dapat segera dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kriteria ini dimaksudkan untuk menentukan makna ekonomi dari suatu transaksi yang berhubungan dengan pelaporan informasi yang relevan dengan tetap mempertahankan faktor materialitas.
- d. Kemampuan mengukur nilai aktiva
Jika akuntan tidak dapat mengukur nilai aktiva baik dengan cara arbitrer (tidak tetap) maupun cara lain maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Keterukuran ini berhubungan dengan reliabilitas (keandalan) informasi.

Standar juga dapat membatasi pengenalan aset. Untuk contoh, IAS 38 / AASB 138 Aset Tidak Berwujud paragraf 48 melarang pengakuan *goodwill* yang dihasilkan dari dalam negeri. Standar menyatakan bahwa itikad baik yang dihasilkan secara internal bukan merupakan sumber daya yang dapat diidentifikasi (tidak dapat dipisah atau tidak timbul dari hak kontraktual atau lainnya) yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur dengan biaya (paragraf 49). Pengakuan tidak diizinkan karena ada kesulitan dalam mengidentifikasi apakah dan kapan aset tidak berwujud akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Selain

itu, biaya untuk menghasilkan aset (yaitu arus keluar yang menimbulkan niat baik) tidak dapat ditentukan dengan andal.

Demikian pula, IAS 38 / AASB 138 membatasi pengakuan aset yang dihasilkan secara internal yang timbul dari pengeluaran penelitian. Semua pengeluaran penelitian dibebankan sebagai akibat karena, pandangan dari pembuat standar, suatu entitas tidak dapat menunjukkan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan dihasilkan. Pengakuan aset yang dihasilkan secara internal yang timbul dari pengeluaran pembangunan diizinkan, tetapi hanya jika kriteria ketat terpenuhi. Kriteria ditunjukkan pada gambar 7.1. Perlakuan tidak konsisten dari berbagai jenis aset tidak berwujud telah diakui oleh pembuat standar. Misalnya, merek yang dihasilkan secara internal tidak dapat dikenali tetapi merek yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis dicatat pada nilai wajar. Sebuah makalah diskusi yang berfokus pada akuntansi awal untuk aset tidak berwujud internal yang dihasilkan dirilis oleh AASB pada tahun 2008 dan memberikan kesempatan untuk diskusi tentang isu-isu ini.

Teori Kepemilikan dan Entitas

Menurut Usmar (2018) terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas.

a. Teori Kepemilikan (Proprietary Theory)

Kepemilikan orang (proprietorship) atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang, maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Dapat dituliskan di dalam persamaan sebagai berikut:

$$P = A - L$$

Kepemilikan (*owner equity*) sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nilai P merupakan representasi dari kekayaan dari pemilik perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Sprague (1980), "*balance sheet merupakan penjumlahan dari elemen-elemen yang membentuk kekayaan pemilik di dalam suatu rentang waktu tertentu. Dengan fokus untuk mengumpulkan kekayaan dalam berbisnis yang juga merupakan peningkatan atas kepemilikan*".

Akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis. Aset melambangkan jumlah yang dimiliki oleh pemilik, sedangkan liabilitas merupakan kewajiban dari pemilik terhadap kreditor. Konsep income dari berbisnis merupakan peningkatan dari kekayaan pemilik yang juga dapat diartikan sebagai return bagi pelaku bisnis. Pemilik atau perwakilan dari pemilik di dalam bisnis melakukan keputusan di dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran.

Pendapatan dan pengeluaran di dalam berbisnis merupakan bagian dari akun P. Kedua akun ini sengaja untuk dipisahkan agar dapat melihat keuntungan yang diterima di dalam proses berbisnis. Pendapatan meningkatkan kepemilikan, sebaliknya pengeluaran menurunkan kepemilikan. Seperti yang dikatakan oleh Vatter (1950), "*pencatatan double entry didasarkan pada ide bahwa pendapatan dan pengeluaran merupakan satu bagian dari kekayaan bersih. Akun yang meningkatkan kekayaan bersih meningkat berdasarkan kredit, sebaliknya akun yang menurunkan kekayaan bersih berdasarkan debit*".

Pendapatan bersih berasal dari kegiatan menghasilkan pendapatan serta perubahan nilai aset (Nursya'adah, 2020). Misalnya, nilai intrinsik dari surat kabar masthead dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika dijual.

Dalam kasus tersebut, argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui, meskipun perubahan kekayaan tersebut abstrak hingga pada saat surat kabar tersebut benar – benar dijual kepada pihak ketiga. Masalah akuntansi adalah mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai.

Secara umum, kata Nursya'adah (2020) praktik akuntansi saat ini didasarkan pada teori kepemilikan. Dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dividen dibayarkan kepada pemilik. Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Modal finansial lebih wajar bila menyangkut teori kepemilikan, dibandingkan dengan modal fisik. Modal finansial menekankan investasi keuangan pemilik, sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik tanpa mempedulikan klaim kepemilikan. Pandangan hak milik tidak melihat perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas. Oleh karena itu, semua laba entitas dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Jika entitas memerlukan sumber daya tambahan. Modal untuk itu tersedia dari sumber daya pribadi si pemilik. Kebanyakan orang mengadopsi pandangan keuangan modal dan juga posisi yang diambil dalam praktek akuntansi konvensional tradisional.

Menurut Septiarini (2011) bahwa akuntabilitas untuk pemilik adalah hal yang penting bagi perusahaan besar karena adanya kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas atau kepengurusan tidak seberarti pada perusahaan besar. Beda halnya dengan kontak pemegang saham dengan urusan perusahaan yang sangat minim.

b. Teori Entitas (Entity Theory)

Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dengan identitasnya sendiri. Menurut Martin ada dua asumsi untuk gagasan entitas akuntansi yaitu:

- *Separation*, untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya.
- *Viewpoint*, prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas.

Meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan dan bahkan untuk organisasi non profit, yang menyediakan:

- Laporan keuangan dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi dan,
- Prinsip dan prosedur Akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepentingan tunggal, seperti kepemilikan.

Ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi adalah antara kepengurusan atau akuntabilitas. Versi tradisional dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, yaitu mereka yang menyediakan dana untuk entitas. Oleh karena itu entitas harus melaporkan status dan konsekuensi dari investasi mereka kepada pemegang saham.

Fokus akuntansi berdasarkan teori ini ialah pada persamaan antara aset dan modal. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus melainkan berfokus kepada diri perusahaan itu sendiri. Pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis:

Aktiva = Ekuitas

Neraca menunjukkan aset entitas, yang Paton sebut mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas, yang disebut sebagai ekspresi berbeda dari total yang sama. Aset milik perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan, bukan pemilik. Hal ini telah diargumenkan karena jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik saham harus dicatat, tujuan ini mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktiva non moneter, karena total pada sisi kanan dari laporan keuangan harus sama dengan total di sisi kiri. Setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik saham, perusahaan menginvestasikan dana dalam aset.

Aset dan beban pada dasarnya memiliki sifat yang sama. mereka menyediakan jasa. Yang membedakannya hanyalah sebuah pertanyaan apakah jasa digunakan hingga habis atau akan digunakan untuk penggunaan masa depan. Karakteristik dasar dari pendapatan adalah pendapatan itu menciptakan aset lebih sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset. Oleh karena itu, teori Akuntansi seharusnya menjelaskan konsep pendapatan (penghasilan) dan biaya dalam hal perubahan aset perusahaan bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pemegang saham.

Paton dan Littleton (2002) berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva, dan karena alasan inilah kenapa *net income* diletakkan pada *retained earning*. Para pemegang saham mendapatkan *residual*, sisanya, setelah para kreditur dibayar dalam hal terjadi likuidasi perusahaan. Penjelasan ini berkembang dari versi konvensional teori ekuitas. Penafsiran yang lebih baru melihat akun laba ditahan sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri. Pembayaran untuk penggunaan uang adalah biaya karena baik kreditur dan pemegang saham dianggap pihak eksternal. Oleh karena itu, bunga perubahan dan dividen, serta pajak penghasilan, adalah biaya-biaya bisnis. Mereka mengurangi jumlah ekuitas entitas memiliki dalam dirinya sendiri.

Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa baik teori kepemilikan dan teori entitas memiliki pengaruh dalam praktik. teori akuntansi konvensional didasarkan pada konsep entitas dan laporan keuangan mencerminkan pandangan entitas, dengan berfokus pada dividen dan laba bersih per saham. Perusahaan memperdagangkan saham mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa pasar menerima bahwa mereka adalah entitas yang terpisah. Namun, pandangan hak milik juga memiliki pengaruh sendiri.

c. Teori Entitas di Indonesia

Dalam mekanisme keuangan Negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian Negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam standar akuntansi pemerintahan dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnama Sari (2013) yang berjudul *Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, dijelaskan bahwa dalam realitas pelaksanaannya, apabila pemilik mengambil aset yang dimiliki oleh UMKM tersebut, baik dalam bentuk fisik maupun uang, seringkali tidak dipisahkan dengan entitas bisnis yang dimiliki. Seringkali penarikan yang dilakukan oleh pemilik hanya diakui sebagai pengurang pendapatan yang terjadi di kegiatan usaha. Hal ini yang menjadi kendala dalam pemisahan modal dalam perusahaan perseorangan (dalam penelitian ini berfokus pada UMKM).

d. Definisi Kewajiban

Kewajiban adalah utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut (IASB *Framework* par 49b). Definisi hutang yang dikemukakan oleh Kieso (2002) dalam bukunya "Akuntansi Intermediate" yaitu:

"Kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu."

Menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*), utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut IAI, kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Dari berbagai pengertian di atas, dua komponen utama utang adalah:

- **Kewajiban Sekarang**

IASB *Framework* menyatakan bahwa kewajiban dapat menyebabkan terjadinya arus keluar dari manfaat ekonomi. Definisi ini berfokus pada peristiwa mendatang, dalam artian pengorbanan sebenarnya belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasari hal ini adalah bahwa kewajiban telah ada dalam hubungannya pengorbanan di masa depan. Sebagai contoh, utang dagang.

Dalam paragraph 62 di IASB *Framework*, diakui bahwa penyelesaian dari kewajiban bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pembayaran kas, transfer aset selain kas, provisi jasa, penggantian kewajiban dengan kewajiban lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas, atau kreditor melepaskan kewajiban yang bersangkutan. Dalam berbagai metode penyelesaian kewajiban, hanya dua cara yang disebutkan di awal yang tentunya terlibat terhadap arus keluar aset. Sebagai contoh, utang dagang akan diselesaikan oleh pembayaran kas (arus keluar aset), sedangkan kewajiban untuk pendapatan dibayar di awal akan diselesaikan dengan provisi barang atau jasa.

- **Transaksi Masa Lalu**

Hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban, peristiwa masa depan tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara kontekstual, termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada utang selama barang belum

diterima; maka peristiwa masa lalu yang dimaksud tentu bukanlah saat pemesanan barang, namun saat penerimaan barang. Sebuah contoh lain dapat dipakai untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar tentang kewajiban sekarang dan peristiwa masa lalu. Ketika sebuah perusahaan pertambangan mengumumkan penambangan, apakah saat itu juga perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban sekarang untuk memulihkan situs tambang? Jawabannya adalah ya, kewajiban sekarang tersebut muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yaitu penandatanganan kontrak.

e. Pengakuan Kewajiban

Akuntan membutuhkan suatu peraturan untuk menentukan pengakuan kewajiban. Jenis peraturan yang diterapkan mirip dengan pengakuan aset, yaitu:

1. Berdasarkan pada hukum
2. Adanya penentuan substansi ekonomi
3. Dapat diukur nilainya
4. Penggunaan prinsip konservatisme

Kriteria pertama, jika ada klaim yang memiliki kekuatan secara hukum, ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban terjadi. Meskipun kewajiban adil atau konstruktif dianut dalam definisi kewajiban, sebagian besar kewajiban ditentukan atas dasar apakah ada kewajiban klaim hukum terhadap entitas untuk memenuhinya. Kewajiban untuk pemulihan operasi penambangan adalah kewajiban hukum jika hukum mensyaratkan pemulihan tetapi juga bisa dianggap sebagai suatu yang adil.

Kriteria kedua mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi. Apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi? Seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban bagi pengguna dalam neraca? Pemegang saham dan investor khawatir tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubungan dengan penyelesaian klaim ganti rugi, sedangkan karyawan khawatir terkait keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim masa depan mereka.

Kriteria ketiga berkaitan dengan menentukan nilai kewajiban. Untuk beberapa kewajiban, nilai diwakili oleh harga kontrak, seperti jumlah uang yang harus dibayar untuk barang dan jasa yang diterima. Nilai kewajiban mungkin berbeda dengan jumlah nominalnya. misalnya, jika kewajiban melibatkan jangka waktu lebih dari 12 bulan harus dipertimbangkan nilai waktu dari uang. Sehingga perhitungan nilai kewajiban akan didasarkan pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, bukan jumlah nominalnya.

Kriteria keempat terkait prinsip konservatisme, bahwa lebih baik mencatat kewajiban terlebih dahulu dibanding aset, sehingga timbul kesan bahwa lebih aman memiliki keadaan *assets understated* daripada *liabilities understated*. Masalah yang kemudian muncul adalah sampai sejauh mana perusahaan akan bersikap konservatis? Konservatisme yang berlebihan akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias, sementara pengambil keputusan tentu memerlukan informasi yang netral dalam mengambil keputusan.

Kewajiban diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur dengan andal.

KESIMPULAN

Aset merupakan sesuatu yang dimiliki saat ini dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat baik sekarang maupun di masa mendatang. Terdapat karakteristik penting dalam membahas definisi aset yaitu manfaat ekonomi masa depan, kontrol oleh entitas, peristiwa masa lalu, dan bias dipertukarkan. Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Praktik menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria. Didasarkan pada hukum, pemakain prinsip konservatif, makna/substansi ekonomi suatu transaksi, kemampuan mengukur nilai aktiva.

Terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas. Kepemilikan orang (proprietorship) atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Kewajiban adalah utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Jenis peraturan yang diterapkan mirip dengan pengakuan aset, yaitu berdasarkan pada hukum, adanya penentuan substansi ekonomi, dapat diukur nilainya, penggunaan prinsip konservatisme. Kewajiban diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur dengan andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *Kinerja*, 8(2), 209-210.
- AZIZ, A., HIDAYAT, A., HERLINA, E., & ERNAWATI, W. (2023). Oligopoly Market and Monopolistic Competition in the Digital Era: Shariah Economic Perspective. *Quality-Access to Success*, 24(193).
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Lai, A., Melloni, G., & Stacchezzini, R. (2018). Integrated reporting and narrative accountability: the role of preparers. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(5), 1381-1405.
- Kristiana, I. (2019). Efek Konvergensi Kerangka Dasar IFRS (IAS 12 Revisi) Terhadap PSAK 46. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 7(1), 48-57.
- MacNeal, R. (1993). *Finite elements*. CRC Press.
- Chambers, A. (2002). *The chambers dictionary*. Allied Publishers.
- Moonitz, M. (1942). The entity approach to consolidated statements. *The accounting review*, 17(3), 236-242.
- IJIRI, Y. S. HA (1977): Skew Distribution and the Size of Business Firm.
- Sprague Jr, R. H. (1980). A framework for the development of decision support systems. *MIS quarterly*, 1-26.
- Hasenfeld, Y., & Paton, A. (1983). *Human service organizations* (p. 50). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Nur, S. W., & SE, M. A. (2020). *Akuntansi Dasar: teori dan teknik penyusunan laporan keuangan*. cendekia Publisher.
- Vatter, W. J. (1950). Accounting education for controllership. *The accounting review*, 25(3), 236-250.
- Parmono, A., & Zahriyah, A. (2021). Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 209-241.
- Usmar, D. (2018). Tinjauan teori akuntansi positif terhadap fenomena creative accounting. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 1(2), 80-92.
- Nursya'adah, D. (2020). Analisis kemampuan prediktif laba kotor, laba operasi, laba bersih, arus kas operasi, perubahan hutang, perubahan piutang, perubahan persediaan dan perubahan beban depresiasi terhadap arus kas operasi masa depan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 120-135.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172-199.

- Elisabeth, D. M. (2019). Kajian terhadap peranan teknologi informasi dalam perkembangan audit komputerisasi (studi kajian teoritis). *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 40-53.
- Putri, R. D. (2022). BAB 4 ASET. *Teori Akuntansi*, 55.
- Sitorus, A. P. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806-814.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Wibowo, A. (2020). Manajemen keuangan. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-324.
- Paton, W. A.; A. C., Littleton. (2002). *An Introduction to Corporate Accounting Standards*. American Accounting Association.
- Financial Accounting Standards Board. (1984). "Statement of Financial Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises". Stamford: Connecticut.
- Financial Accounting Standart Board. (1990.) *Statement Of Financial accounting Standard No.3 Accounting for Lease*. Volume I. Illinois: Irwin Homewood.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (2).
- Kurniawati, H. (2011). Sistem Pengendalian Intern pada Perusahaan Kecil dan Menengah. *Binus Business Review*, 2(2), 923-935.
- PUTRA, B. M. (2021). Konstruksi Hukum Sistem Akuntansi Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 AYAT (3)
- Purnama, Dian Sari. (2013). Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol 4 (2), hlm. 165-329.
- Weygandt, Kieso, Warfield. 2002. Akuntansi *Intermediate Jilid 1*. (ed.10). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2023). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(1), 72-97.
- Sprague Jr, R. H. (1980). A framework for the development of decision support systems. *MIS quarterly*, 1-26.
- Putri, R. D. (2022). BAB 4 ASET. *Teori Akuntansi*, 55.
- Romita, R., Aponno, M. F., & Pesireron, S. (2015). Revaluasi Terhadap Asset Tetap Berwujud Mesin Kompresor Pada PT. Samudra Sakti Sepakat. *Jurnal Maneksi*, 4(2), 6-11.
- Harmain, H., Nurlaila, N., Safrida, L., Sufritayati, S., Alfurkaniati, A., Ermawati, Y., & Nurwani, N. (2019). Pengantar Akuntansi I.